Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jayapura

Menurut Pengeluaran 2016-2020

https://jayapurakab.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN JAYAPURA

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jayapura

Menurut Pengeluaran

2016-2020

https://jayapurakab.bps.go.id

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN JAYAPURA
MENURUT PENGELUARAN 2016 – 2020

ISBN:
Nomor Publikasi:
Katalog BPS:

Ukuran Buku: 21,5 cm x 29,7 cm
Jumlah halaman: xv + 126 halaman

Naskah/*Script*:
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit:
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh:
©Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayapura

Dicetak Oleh:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayapura

https://jayapurakab.bps.go.id

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN / *DRAFTING TEAM*

PenanggungjawabUmum/*General in Charge*:
Jeffry Yohanes Defretes, S.Kom., M.M.

Penyunting/*Editor*:
Ramadhan Indra. P., S.ST.

Penulis/*Writer*:
Windy Army Iriyanti, S.ST.

Pengolah Data/*Data Processor*:
Windy Army Iriyanti, S.ST.

Gambar Kulit/*Cover Design*:
Ramadhan Indra. P., S.ST

https://jayapurakab.bps.go.id

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*finacial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu :pendekatan produksi/penyediaan(PDB menurut Lapangan Usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDB menurut Pengeluaran /*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya mengunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

https://jayapurakab.bps.go.id

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa mendatang.

Disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

https://jayapurakab.bps.go.id

Jayapura, April 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Jayapura,

Jeffry Y. De Fretes S.Kom, MM.

DAFTAR ISI

		Hal.
KATA PENGANTAR		**i**
DAFTAR ISI		**iii**
DAFTAR TABEL		**v**
DAFTAR GRAFIK		**vii**
DAFTAR LAMPIRAN		**vii**
BAB I.	**PENDAHULUAN**	
1.1.	Pengertian PDRB	1
1.2.	Kegunaan Statistik PDRB	3
BAB II.	**METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA**	
2.1.	Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	5
2.2.	Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	9
2.3.	Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	12
2.4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	17
2.5.	Perubahan Inventori	23
2.6.	Ekspor dan Impor	28
BAB III.	**TINJAUAN PEREKONOMIAN JAYAPURA BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN JAYAPURA TAHUN 2016 – 2020**	
3.1.	Tinjauan Agregat PDRB Jayapura Menurut Pengeluaran	31
3.2.	Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	36
3.3.	Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	42
3.4.	Konsumsi Akhir Pemerintah	43
3.5.	Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	44
3.6.	Perkembangan Perubahan Inventori	46
3.7.	Perkembangan NET Ekspor Antar Daerah	48

https://jayapurakab.bps.go.id

DAFTAR ISI

BAB IV. PERKEMBANGAN AGREGAT PRDB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2016 – 2020

4.1. PDRB (Nominal) 50

4.2. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pembentukan Modal TetapBruto (PMTB) 51

4.3. Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB..... 52

4.4. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) 53

PENUTUP..... 56

LAMPIRAN..... 58

DAFTAR PUSTAKA

https://jayapurakab.bps.go.id

DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel 1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jayapura Tahun 2016 - 2020	32
Tabel 2.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jayapura Tahun 2016 - 2020 ..	33
Tabel 3.	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jayapura Tahun 2016 – 2020	34
Tabel 4.	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jayapura Tahun 2016 – 2020	35
Tabel 5.	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Jayapura, Tahun 2016 – 2020	36
Tabel 6.	Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir RumahTangga Kabupaten Jayapura, Tahun 2016 - 2020	37
Tabel 7.	Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir RumahTangga Kabupaten Jayapura, Tahun 2016 - 2020	39
Tabel 8.	Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir RumahTangga Kabupaten Jayapura, Tahun 2016 - 2020	40
Tabel 9.	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Jayapura, Tahun 2016 - 2020	41
Tabel 10.	Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kabupaten Jayapura, Tahun 2016 - 2020	42
Tabel 11.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Jayapura, Tahun 2016 – 2020	43
Tabel 12.	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Jayapura, Tahun 2016 - 2020	45
Tabel 13.	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Jayapura, Tahun 2016 - 2020	47
Tabel 14.	Perkembangan dan Struktur Perubahan Net Ekspor Antar Daerah Kabupaten Jayapura, Tahun 2016 – 2020	48
Tabel 15.	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Jayapura, Tahun 2016 - 2020	50
Tabel 16.	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2016 - 2020	51

DAFTAR TABEL

Tabel 17.	Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Jayapura, Tahun 2016 - 2020	52
Tabel 18.	Incremental Capital Output Ratio, Kabupaten Jayapura, Tahun 2016 – 2020.....	55

https://jayapurakab.bps.go.id

DAFTAR GRAFIK

		Hal.
Grafik 1.	Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jayapura, Tahun 2016 – 2020 (Milyar)	33

DAFTAR LAMPIRAN

		Hal.
Tabel 1.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jayapura	58
Tabel 2.	ProdukDomestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran,Kabupaten Jayapura	59
Tabel 3.	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jayapura	60
Tabel 4.	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jayapura	61
Tabel 5.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran,Kabupaten Jayapura	62
Tabel 6.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jayapura	63
Tabel 7.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jayapura	64
Tabel 8.	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran,Kabupaten Jayapura	65
Tabel 9.	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jayapura	66

https://jayapurakab.bps.go.id

https://jayapurakab.bps.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indiator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu Negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ketahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

https://jayapurakabbps.id

a. Menurut Pendekatan Produksi,

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu Negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan DaurUlang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan

Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi, 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu Negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa factor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari:
(1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

https://jayapurakab.bps.go.id

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indicator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sector menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sector ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.

4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.

5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.

6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.

https://jayapurakab.bps.go.id

7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

https://jayapurakab.bps.go.id

BAB II
METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

https://jayapurakab.bps.go.id

2.1. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

https://jayapurakab.bps.go.id

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu region. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (Classifications of Individual Consumption by Purpose) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

https://jayapurakab.bps.go.id

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sbb:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (owner occupied dwellings); Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (direct purchase) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor).

Terdapat beberapa catatan yang perlu dikatahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

https://jayapurakab.bps.go.id

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Selama ini, penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung underestimate (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (adjustment). Dalam melakukan adjustment, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator suplay dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil adjustment, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
   a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun.
   b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun.
2. Data poin ke 1 dikelompokan menjadi 7 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas yang mungkin dikontrol secara tersendiri;

https://jayapurakab.bps.go.id

3. Terhadap data poin ke 3 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-adjust;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

i. Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

https://jayapurakab.bps.go.id

ii. Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;

- Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai profit atau surplus, karena profit yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- Kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- Istilah nonprofit tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/ hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar,

perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.

b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya.
c. Penyusutan.
d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data
   - Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).
     Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
   - Hasil up-dating direktori LNPRT.
     Informasi yang diperoleh dari hasil up-dating direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
   - Indeks Harga Konsumen (IHK).
2. Metode penghitungan

   PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sbb :

   - Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sbb :

https://jayapurakab.bps.go.id

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

$\bar{x}_{ij}$: Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga.

i : Jenis lembaga LNPRT, i = 1, 2, 3, …, 7.

j : Jenis pengeluaran LNPRT, j = 1, 2, 3, …, 19.

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sbb:

$$X = \sum_{i=1}^{7} \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

https://jayapurakab.bps.go.id

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lain-nya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

https://jayapurakab.bps.go.id

ii. Konsep Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sbb:

1. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidentil dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dala hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup :

a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi;
b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan;
c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi;
d. PK-Pemerintah Desa/ Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

https://jayapurakab.bps.go.id

iv. Penghitungan PDRB Penggunaan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
d. Output Bank Indonesia (BI)
e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementrian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

https://jayapurakab.bps.go.id

2. Metode Penghitungan

a. PK-P Provinsi adh Berlaku

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut:

PK-P adh Berlaku =

Output non pasar – penjualan barang dan jasa + output Bank

Output non-pasar dihitung dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu: Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yg dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Provinsi, PK-P Provinsi adh Berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah

Provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/ Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada diwilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

b. PK-P Provinsi adh Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

https://jayapurakab.bps.go.id

2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

1. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (fixed asset) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

https://jayapurakab.bps.go.id

2. Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (financial leasing) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (financial leasing) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah ”bruto” mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan.

Penyusutan atau konsumsi barang modal (Consumption of Fixed Capital) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

3. Cakupan

PMTB terdiri dari :

a. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (cultivated asset), produk kekayaan intelektual (intellectual property products), dan sebagai-nya;
b. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
c. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

https://jayapurakab.bps.go.id

4. Penghitungan PMTB Tahunan

4.1. Sumber data:

a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov/Kab/Kota.
b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).
d. Laporan keuangan perusahaan.

e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
i. Publikasi Statistik Konstruksi.
j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

https://jayapurakab.bps.go.id

4.2. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan "langsung" adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan "tidak langsung" adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan "arus komoditas". Dalam hal ini penyediaan atau "supply" dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

4.2.1. Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang

dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di "deflate" (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

https://jayapurakab.bps.go.id

4.2.2. Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (commodity flow approach). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (supply), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal

lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan men-deflate PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara "ekstrapolasi" atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di "reflate"(dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). Ke dua, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men"deflate" PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data

https://jayapurakab.bps.go.id

laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (entertainment, literary, or artistic original products), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan cara mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (Trade and Transport Margin) sulit diperoleh.

https://jayapurakab.bps.go.id

c. Selang (Lag) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5. PERUBAHAN INVENTORI

i. Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

https://jayapurakab.bps.go.id

ii. Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (intermediate consumption) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (work in progress), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

https://jayapurakab.bps.go.id

iii. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sbb :

a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (material & supplies), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;

c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
f. Ternak untuk tujuan dipotong;
g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

https://jayapurakab.bps.go.id

iv. Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. **Sumber data**

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD.
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.

- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi "korporasi", sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi "komoditas".

Di lihat dari sisi manfaat-nya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

https://jayapurakab.bps.go.id

2.1. Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (balance sheet) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sbb :

a. Menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara mendeflate stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
b. Menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan

c. Menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan menginflate perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

2.2. Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (commodity flow). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. mendeflate nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harga-nya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan adjustment dengan cara me-mark-up, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

https://jayapurakab.bps.go.id

2.6. EKSPOR IMPOR

i. Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

https://jayapurakab.bps.go.id

ii. Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefiniskan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii. Cakupan

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut

Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya

c. Net Ekspor antar daerah
   - Ekspor antar daerah
   - Impor antar daerah

iv. Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

1. Sumber data

a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US$)
b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US$)
c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

https://jayapurakab.bps.go.id

2. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga free on board (fob) dalam US$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca

Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (direct purchase) dan transaski yang tidak terdokumentasi (undocumented trasnsaction) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

https://jayapurakab.bps.go.id

BAB III
TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN JAYAPURA BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2016 – 2020

https://jayapurakab.bps.go.id

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Jayapura akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2016 s.d 2020, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Jayapura digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

https://jayapurakab.bps.go.id

3.1. TINJAUAN AGEGAT PDRB JAYAPURA MENURUT PENGELUARAN

Kondisi perekonomian Kabupaten Jayapura terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB.

Nilai PDRB Kabupaten Jayapura Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama periode tahun 2016 s.d 2020 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun kecuali di tahub 2020. Pada tahun 2020 PDRB Kabupaten Jayapura sebesar 15,64 triliun rupiah menurun sebesar -4,57 persen dari tahun 2019. Penurunan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume pengeluaran.

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jayapura Tahun 2016-2020

(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5.332,74	6.040,07	6.938,79	7.845,56	7.622,71
2. Konsumsi LNPRT	71,99	87,37	106,42	135,89	144,85
3. Konsumsi Pemerintah	2.315,61	2499,36	2.744,55	2.891,96	3.084,20
4. PMTB	2.541,83	2.965,28	3.500,70	4.147,99	4.473,28
5. Perubahan Inventori	10,89	12,86	15,21	9,53	11,60
6. Ekspor Neto	1.237,75	1.286,20	1.225,09	1.363,84	308,46
Total PDRB	**11.510,82**	**12.891,15**	**14.531,35**	**16.394,78**	**15.645,11**

*Catatan : * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara*

https://jayapurakab.bps.go.id

Selain dinilai Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), PDRB menurut pengeluaran juga dinilai Atas Dasar Harga Konstan 2010 di mana berbagai produk yang dinilai menggunakan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas tanpa adanya pengaruh perubahan harga. Dengan kata lain, PDRB komponen pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil yang ditandai dengan adanya peningkatan volume konsumsi akhir.

Selama kurun waktu 2016–2020, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kabupaten Jayapura berdasarkan PDRB adh Konstan dapat dilihat pada tabel 2.Sama halnya dengan PDRB adh Berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB adh Konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jayapura Tahun 2016-2020

(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3.725,54	4.009,90	4.292,07	4.636,07	4.382,76
2. Konsumsi LNPRT	48,99	53,31	61,29	75,31	81,45
3. Konsumsi Pemerintah	1.600,41	1.663,88	1.690,00	1.722,44	1.759,64
4. PMTB	1.765,34	1.938,59	2.092,22	2.279,40	2.353,52
5. Perubahan Inventori	4,46	4,80	5,19	2,30	14,60
6. EksporNeto	936,49	977,05	1.172,21	1.313,58	925,76
Total PDRB	**8.081,23**	**8.647,53**	**9.312,18**	**9.987,84**	**9.517,73**

*Catatan : * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara*

https://jayapurakab.bps.go.id

Grafik 1. Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jayapura, Tahun 2016 – 2020 (Milyar)

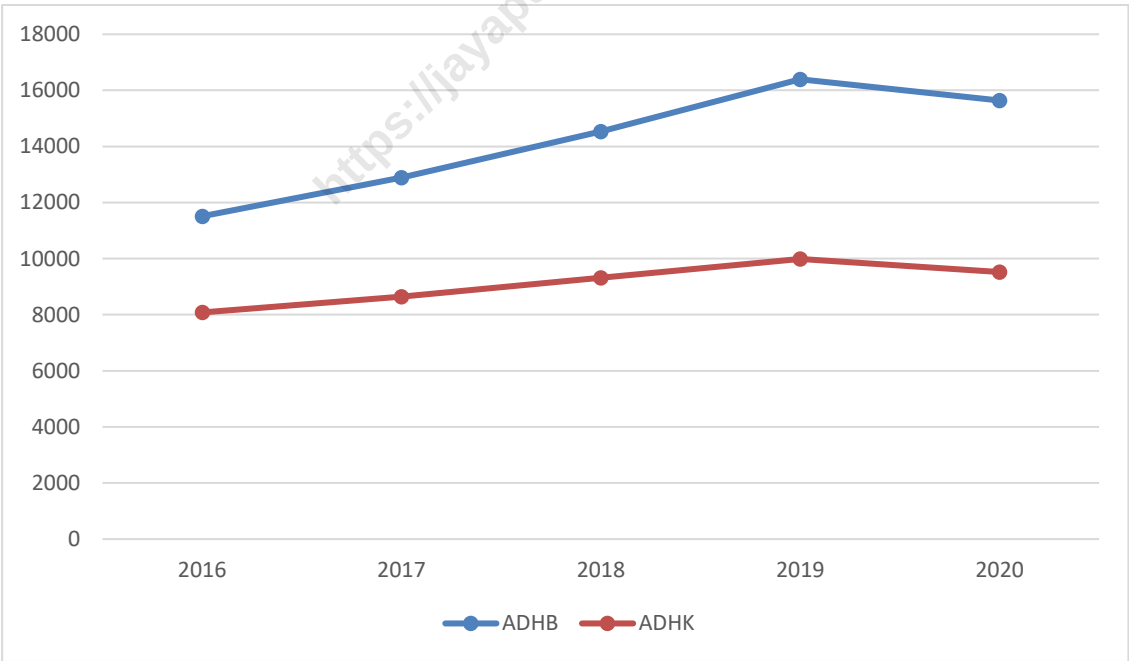

Dari grafik di atas, nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB adh Berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku. Dalam PDRB adh Konstan pengaruh faktor harga telah ditiadakan. Dari grafik tersebut terlihat dari tahun ke tahun perbedaan nilai adh Berlaku dan adh Konstan semakin besar, hal ini menunjukkan inflasi yang terjadi di Kabupaten Jayapura cukup besar (lebih besar dari pertumbuhan ekonominya).

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

https://jayapurakab.bps.go.id

Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jayapura Tahun 2016—2020

(persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	46,33	46,85	47,78	47,85	48,72
2. Konsumsi LNPRT	0,63	0,68	0,73	0,83	0,93
3. Konsumsi Pemerintah	20,12	19,39	18,90	17,64	19,71
4. PMTB	22,08	23,00	24,11	25,30	28,59
5. Perubahan Inventori	0,09	0,10	0,10	0,06	0,07
6. Ekspor Neto	10,75	9,98	8,43	8,32	1,97
Total PDRB	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

*Catatan : * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara*

Berdasarkan tabel 3 diatas terlihat bahwa selama periode 2016 – 2020, produk yang dikonsumsi (konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, konsumsi pemerintah) di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga. Di sisi lain, pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 21,86 sampai 25,25 persen. Proporsi konsumsi

akhir pemerintah berada pada rentang 17,60 s.d 20,19 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik juga cukup besar.

Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jayapura Tahun 2016—2020

(persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	6,88	7,63	7,04	8,01	-5,46
2. Konsumsi LNPRT	7,61	8,83	14,96	22,88	8,16
3. Konsumsi Pemerintah	7,01	3,97	1,57	1,92	2,16
4. PMTB	6,29	9,81	8,67	8,67	2,80
5. Perubahan Inventori	7,48	7,74	8,15	-55,75	535,18
6. EksporNeto	24,28	4,33	18,41	9,11	-26,66
Total PDRB	8,54	7,01	7,69	7,26	-4,71

*Catatan : * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara*

https://jayapurakab.bps.go.id

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jayapura dari tahun 2020 secara rata-rata mencapai 8,17 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 8,54 persen (2016); 7,01 persen (2017); 7,69 persen (2018); 7,26 persen (2019); dan -4,71 persen (2020). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 8,54 persen, sebaliknya pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 (-4,71 persen).

Sementara itu, indeks implisit[1] PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) menunjukkan pergerakan yang dinamis.

Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Jayapura, Tahun 2016 – 2020

(persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	143,14	150,63	161,67	169,23	173,92
2. Konsumsi LNPRT	146,97	163,88	173,64	180,45	177,83
3. Konsumsi Pemerintah	144,69	150,21	162,40	167,90	175,27
4. PMTB	143,99	152,96	166,17	181,18	190,07
5. Perubahan Inventori	244,25	267,75	292,79	414,81	79,46
6. Ekspor Neto	132,17	131,64	105,95	108,04	33,32
Total PDRB	**142,44**	**149,07**	**155,94**	**164,15**	**164,38**

*Catatan : * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara*

bps.jayapuradkab.bps.go.id

Nilai Indeks Implisit PDRB Kabupaten Jayapura dari tahun 2016 sampai 2020 selalu menunjukkan nilai yang meningkat. Hal ini menunjukkan terjadinya kenaikan harga atau yang disebut dengan inflasi. Perubahan harga terkecil terjadi pada tahun 2016 dengan perubahan harga yang ada sebesar 6,30 persen. Perubahan harga terbesar terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,14 persen.

3.2. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga mempunyai porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Jayapura. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana

[1]*Indeks perkembangan*

sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2016 s.d 2020 menunjukkan pola fluktuatif. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu 47,78 persen sedangkan titik terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu 46,33 persen.

Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Jayapura, Tahun 2016—2020

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB *(Miliar Rp)*	5.332,74	6.040,07	6.938,79	7.845,56	7.622,71
b. ADHK 2010=100*(Miliar Rp)*	3.725,54	4.009,90	4.292,07	4.536,07	4.382,76
c. Proporsi terhadap PDRB *(% ADHB)*	46,33	46,85	47,78	47,75	48,72
2. Rata-rata konsumsi per kapita/tahun *(Ribu Rp)*					
a. ADHB	43.082,40	47.956,58	53.961,83	59.525,35	56.809,58
b. ADHK 2010=100	30.098,08	31.830,92	33.378,72	34.415,79	32.663,29
3. Pertumbuhan[2]					
a. Total konsumsi RT	6,88	7,63	7,04	8,01	-5.46
b. Perkapita	4,83	5,76	4,86	3,11	-5,09
Jumlah penduduk *(orang)*	121.410	123.780	125.975	128.587	131.802

*Catatan : * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara*

https://jayapurakab.bps.go.id

Data tabel 6, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2016 – 2020 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (adh Berlaku) maupun riil (adh Konstan), kecuali di tahun 2020 akibat dari pembatasan kegiatan ekonomi karena pandemi COVID-19. Kenaikan jumlah penduduk mendorong

[2]*Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)*

terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Meningkatnya pendapatan masyarakat dan bantuan-bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat ikut mendorong bertambahnya konsumsi. Selain itu, melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara umum, rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kabupaten Jayapura meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan konsumsi per-kapita secara “riil” berkisar antara 3,11-5,76 persen. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga ADHK sebesar 7,63 persen pada tahun 2017. Kemudian, mengalami perlambatan pada tahun berikutnya yaitu sebesar 7,04 persen (2018), mengalami perlambatan pada tahun berikutnya menjadi 8,01 persen (2019). Sedangkan pada tahun 2020 konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan negatif -5,46 persen.

Sementara itu, pertumbuhan konsumsi rumah tangga per-kapita dari 5,76 persen ditahun 2017 menjadi sebesar 4,89 persen ditahun 2018; mengalami perlambatan ditahun 2019 3,11 persen ditahun 2019. Pada tahun 2020 konsumsi rumah tangga per-kapita mengalami pertumbuhan negatif -5,09 persen.

Tampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “riil” lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang rata-rata berada pada kisaran 2,07 persen. Hal ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

https://jayapurakab.bps.go.id

Tabel 7. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Jayapura, Tahun 2016—2020[3]

(persen)

Komponen Pengeluaran (1)	2016 (2)	2017 (3)	2018 (4)	2019* (5)	2020** (6)
Konsumsi Makanan	47,63	48,35	49,87	52,30	55,07
Konsumsi Non Makanan	52,37	51,65	50,13	47,70	44,93
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

*Catatan : * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara*

Secara rata-rata dari tahun 2016 s.d 2020, tampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Kabupaten Jayapura, bahwa konsumsi makanan sedikit lebih rendah dibandingkan konsumsi bukan makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan cenderung selalu berada pada kisaran yang sama yaitu sekitar 49 persen untuk makanan dan 51 persen untuk non makanan. Kondisi proporsi dimana non makanan lebih besar seperti ini biasanya terjadi pada daerah yang sudah maju, namun di Kabupaten Jayapura tidak seperti itu. Kondisi ini terjadi dikarenakan mahalnya harga-harga barang non makanan terutama untuk transportasi dimana sebagian besarnya harus menggunakan pesawat terbang, dan harga bahan bangunan atau konstruksi yang harganya tinggi. Walaupun begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

https://jayapurakab.bps.go.id

[3]*Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)*

Tabel 8. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Jayapura, Tahun 2016—2020

(persen)

Komponen Pengeluaran (1)	2016 (2)	2017 (3)	2018 (4)	2019* (5)	2020** (6)
Konsumsi Makanan	7,41	7,27	8,75	10,03	-0,20
Konsumsi Non Makanan	6,41	7,98	5,53	6,19	-10.41
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	**6,34**	**6,88**	**7,63**	**7,04**	**8,01**

*Catatan : * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara*

https://jayapurakab.bps.go.id

Dilihat dari pertumbuhan "riil" nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok makanan menunjukkan pergerakan stabil, yakni masing-masing sebesar 7,41 persen (2016) ; 7,27 persen (2017) ; 8,75 persen (2018) ;dan 10,03 persen (2019) namun mengalami penurunan sebesar -0,20 persen (2020). Informasi ini menunjukkan bahwa masyarakat mengurangi konsumsi non makanannya dikarenakan melesunya perekonomian di Kabupaten Jayapura yang berakibat berkurangnya pendapatan masyarakat. Sehingga masyarakat cenderung untuk mengutamakan konsumsi makanan terlebih dahulu dan mengurangi konsumsi non makanannya.

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam tabel 9, berada pada kisaran 2,78-7,33 persen setiap tahunnya untuk total kelompok konsumsi. Rincian peningkatan harga pada kelompok makanan dan minuman non beralkohol sebesar 7,50 persen (2016) ; 7,57 persen (2018) ; 9,84 persen (2018) ; 8,72 (2019) dan 2,59 persen (2020). Sementara itu, konsumsi pakaian dan alas kaki 2,62 persen (2016) kemudian pada tahun berikutnya 2,98 persen (2017); 5,83 persen (2018) ; 0,39 persen (2019) dan 4,45 persen ditahun 2020.

Sedangkan konsumsi untuk transportasi/angkutan dari 7,70 persen (2016) kemudian pada tahun 2017 sebesar 2,10 persen; 5,78 persen (2018) ; -0,74 persen (2019) dan 2,15 persen ditahun 2020.

Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Jayapura, Tahun 2016—2020[4]

(persen)

Komponen Pengeluaran (1)	2016 (2)	2017 (3)	2018 (4)	2019* (5)	2020** (6)
Makanan dan Minuman Non Beralkohol	7,50	7,57	9,84	8,72	2,59
Minuman Beralkohol dan Rokok	4,76	4,16	1,96	-0,66	2,13
Pakaian	2,62	2,98	5,83	0,39	4,45
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	2,14	3,54	2,58	1,18	0,07
Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	2,74	3,16	4,87	-1,69	1,88
Kesehatan	3,02	3,34	5,87	4,49	3,19
Transportasi/Angkutan	7,70	2,10	5,78	-0,74	2,15
Komunikasi	2,19	4,22	5,13	2,98	2,96
Rekreasi dan Budaya	6,33	5,52	7,39	-2,96	1,84
Pendidikan	3,89	8,66	5,55	2,51	1,51
Penginapan dan Hotel	2,61	2,51	6,96	2,44	2,73
Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	3,50	5,37	8,01	4,72	1,55
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	**5,35**	**5,23**	**7,33**	**4,68**	**2,78**

*Catatan : * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara*

https://jayapurakab.bps.go.id

3.3. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

[4]*Tingkat perubahan harga produk konsumsi*

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Data menggambarkan hal tersebut, dimana besar proporsi terhadap PDRB selalu dibawah 5 (lima) persen.

Tabel 10. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kabupaten Jayapura, Tahun 2016—2020

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB *(Miliar Rp)*	71,99	87,37	106,42	135,89	144,85
b. ADHK 2010*(Miliar Rp)*	48,99	53,31	61,29	75,31	81,45
c. Proporsi terhadap PDRB *(% ADHB)*	0,63	0,68	0,73	0,83	0,93
d. Pertumbuhan (ADHK) (%)	7,61	8,83	14,96	22,44	8,16

*Catatan : * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara*

https://jayapurakab.bps.go.id

Data pada tabel 10. menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2016 – 2020 konsumsi akhir LNPRT selalu mengalami peningkatan baik dari sisi nominal (adh Berlaku) maupun riil (adh Konstan).

Secara rata-rata dari tahun 2016 s.d 2020, terlihat bahwa struktur konsumsi akhir LNPRT berkisar antara 0,63 – 0,93 persen terhadap total PDRB Kabupaten Jayapura.Proporsi pengeluaran cenderung berada pada kisaran yang sama, yakni sebesar 0,63 persen (2016) ; 0,68 persen (2017) ; 0,73 persen (2018) ; 0,83 persen (2019) ; dan 0,93 persen (2020).

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran LNPRT menunjukkan pola pergerakan percepatan yang dinamis, yakni sebesar 7,61 persen (2016) ; 8,33 persen (2017) ; 14,21 persen (2018); 22,44 persen (2019) dan 8,16 persen (2020). Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi LNPRT dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Adanya aktivitas Pilkada, Pemilu

legislatif dan Presiden memberikan dampak sumbangan besar terhadap pertumbuhan konsumsi LNPRT.

3.4. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Jayapura serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian dibawah ini.

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Jayapura, Tahun 2016 – 2020

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB *(Miliar Rp)*	2.315,61	2.499,36	2.744,55	2.891,96	3.084,20
b. ADHK 2010*(Miliar Rp)*	1.600,41	1.663,88	1.690,00	1.722,44	1.759,64
c. Proporsi terhadap PDRB *(%-ADHB)*	20,12	19,39	18,90	17,64	19,71
Konsumsi Pemerintah per-kapita *(Ribu Rp)*					
a. ADHB	18.707,46	19.840,13	21.343,92	21.941,70	22.985,54
b. ADHK 2010	12.929,47	13.208,02	13.142,85	13.068,39	13.114,02
Pertumbuhan[5]					
a. Total konsumsi	-	3,97	1,57	1,92	2,16
b. Konsumsi perkapita	-	2,15	-0,49	-0,57	0,34
Jumlah penduduk *(orang)*	123.780	125.975	128.587	131.802	134.180

https://jayapurakab.bps.go.id

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2016 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADHB sebesar 2,031 triliun rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2020 nilainya mencapai 3,08 triliun rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah ADHK 2010, yang juga

[5] *Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2010)*

mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB di Kabupaten Jayapura cenderung menurun dimana pada tahun 2016, proporsi pengeluaran akhir pemerintah sebesar 20,12% dan menurun hingga pada tahun 2020 menjadi 19,71%

Dalam praktiknya, pengeluaran pemerintah sering kali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita.

Konsumsi pemerintah per-kapita ADHK 2010 juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas. Hal tersebut juga dapat dilihat dari laju pertumbuhannya yang sebesar 3,97 persen pada tahun 2017, dan menurun menjadi 1,57 persen di tahun 2018, 1,92 persen ditahun 2019 dan 2,16 ditahun 2020.

https://jayapurakab.bps.go.id

3.5. PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)[6]. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal

[6]*Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor*

maupun riil. Data di atas menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dari 5,97 persen ditahun 2016, 6,29 persen (2017), 9,81 persen ditahun 2018; 7,92 persen ditahun 2019 dan tumbuh 8,95 persen ditahun 2020.

Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Jayapura, Tahun 2016—2020

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB *(Miliar Rp)*	2.541,83	2.965,28	3.500,70	4.147,99	4.473,28
b. ADHK 2010*(Miliar Rp)*	1.765,34	1.938,59	2.092,22	2.279,40	1.759,64
Proporsi terhadap PDRB *(%-ADHB)*	25,14	23,63	21,87	20,56	
Struktur PMTB [7]					
Bangunan *(%)*	69,43	69,88	69,94	70,77	71,31
Non Bangunan *(%)*	30,57	30,12	30,06	29,23	28,69
Total PMTB *(%)*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan[8] (%)					
a. Bangunan	5,72	11,88	8,22	9,49	3,30
b. Non Bangunan	7,64	4,90	9.81	6,62	1,52
PMTB	6,29	9,81	8,67	8,67	2,80

*Catatan : * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara*

https://jayapurakab.bps.go.id

Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen sangat bervariasi antar tahunnya. Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap.

Pertumbuhan di sektor bangunan cenderung meningkat dengan pola yang relatif stabil. Pertumbuhan pada tahun 2016 sebesar 5,72 persen, 11,88 persen ditahun 2017, dan mengalami perlambatan menjadi 7,50 persen ditahun 2018. Sedangkan pada tahun 2020 bangunan kembali mengalami percepatan menjadi 9,49 persen dan mengalami perlambatan kembali sebesar 3,30 persen.

[7]*Diturunkandariperhitungan PDRB (atasdasarhargaberlaku /ADHB)*
[8]*Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)*

Proporsi non bangunan terhadap total PMTB juga relatif stabil selama periode 2016 – 2020 (tabel 13). Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB tersebut. Peranan komponen non bangunan terhadap total PMTB pada tahun 2016 sebesar 30,57 persen. Pada tahun 2017 proporsinya sebesar 30,12 persen. Ditahun 2018 hingga 2020 proporsi non bangunan kembali menurun menjadi 30,06 persen, 29,23 persen dan 28,69 persen.

Sementara jika dilihat pertumbuhannya, sub komponen non bangunan menunjukkan pola positif yang lebih bervariasi antar tahunnya. Dalam periode tahun 2017 s.d 2019 pertumbuhan non bangunan berfluktuasi tiap tahunnya. Pada tahun 2016 sebesar 7,64 persen, 4,90 ditahun 2017 dan 9,81 persen di 2018. Pada tahun 2019 dan 2020 non bangunan mengalami perlambatan dengan tumbuh 6,62 persen dan 1,52

https://jayapurakab.bps.go.id

3.6. PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk **"persediaan"** berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan

pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Jayapura, Tahun 2016—2020

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB *(Miliar Rp)*	10,89	12,86	15,21	9,53	11,60
b. ADHK 2010*(Miliar Rp)*	4,46	4,80	5,19	2,30	14,60
Proporsi terhadap PDRB (%-ADHB)	0,09	0,10	0,10	0,06	0,07

*Catatan : * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara*

https://jayapurakab.bps.go.id

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis lebih rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih lanjut. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Pada Tahun 2016 perubahan inventori mengalami penambahan sebesar 10,89 miliar rupiah. Sedangkan di tahun 2017 mengalami penambahan sebesar 12,86 miliar rupiah atau bertambah sebesar 1,97 miliar rupiah dari tahun 2016. Pada tahun 2018 sebesar 15,21 miliar rupiah, 9,53 miliar rupiah ditahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 perubahan inventori Kabupaten Jayapura 11,60 miliar rupiah.

3.7. PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar provinsi menjadikan komponen ini (dalam Seri PDRB adh Konstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda **"positif"** berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

https://jayapurakab.bps.go.id

Tabel 14. Perkembangan dan Struktur Perubahan Net Ekspor Antar Daerah Kabupaten Jayapura, Tahun 2016—2020

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Net Ekspor					
a. ADHB *(Miliar Rp)*	1.237,75	1.286,20	1.225,09	1.363,84	308,46
b. ADHK 2010*(Miliar Rp)*	936,49	977,05	1.156,91	1.262,32	925,76
Proporsi terhadap PDRB (%-ADHB)	10,75	9,98	8,43	8,32	1,97

*Catatan : * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara*

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling.* Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand)* dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di

suatu perekonomian. Penghitung ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance.* Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang *(balancing item)* dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

https://jayapurakab.bps.go.id

BAB IV
PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2016 – 2020

https://jayapurakab.bps.go.id

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran "produktivitas", karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

https://jayapurakab.bps.go.id

Tabel 15. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Jayapura, Tahun 2016—2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB *(Miliar Rp)*					
- ADHB	11.510,82	12.891,15	14.531,75	16.394,78	15.645,11
- ADHK 2010	8.081,23	8.647,53	9.312,18	9.987,84	9.517,73
Pertumbuhan ADHK 2010	8,54	7,01	7,69	7,26	-4,71
PDRB perkapita *(RibuRp)*					
- ADHB	92.994,18	102.331,02	112.933,27	124.389,46	116.597,92
- ADHK 2010	65.290,09	68.644,81	72.422,41	75.756,36	70.932,557
Pertumbuhan ADHK 2010	6,46	5,14	5,50	4,60	-6,37
Jumlah penduduk *(org)*	123.780	125.975	128.587	131.802	134.180
Pertumbuhan Penduduk	1,95	1,77	2,07	2,50	1.80

*Catatan: * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara*

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga,

dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita.

PDRB per-kapita Kabupaten Jayapura menunjukkan kecenderungan pola peningkatan dari tahun ke tahun (tabel 18), namun pada tahun 2020 terjadi penurunan konsumsi masyarakat akibat dari pembatasan kegiatan ekonomi di Kabupaten Jayapura. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Jayapura rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Sedangkan pertumbuhan per-kapita secara "riil" juga menunjukkan kecenderungan pola peningkatan. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, sehingga pertumbuhan per-kapita tersebut tidak saja terjadi secara "riil" tetapi juga terjadi secara kualitas.

https://jayapurakab.bps.go.id

4.2 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Jayapura digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 16. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2016—2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) *(Miliar Rp)*	**5.332,74**	**6.040,07**	**6.938,79**	**7.845,56**	**7.622,71**
Total PMTB (ADHB) *(Miliar Rp)*	**2.541,83**	**2.965,28**	**3.500,70**	**4.147,99**	**4.473,28**

Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	**2,10**	**2,04**	**1,98**	**1,89**	**1,70**

*Catatan: * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara*

Berbeda halnya terhadap ekspor, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB tidak begitu banyak berubah namun cenderung menujukkan pernurunan walau sangat tipis.Hal ini terjadi karena adanya percepatan investasi secara signifikan diikuti oleh pergerakan konsumsi akhir rumah tangga yang juga mengalami percepatan. Besarnya rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB bergerak dari sebesar 2,10 pada tahun 2016 dan 2,04 pada 2017. Pada tahun-tahun berikutnya rasionya terus bergerak cenderung menurun yaitu 1,98; 1,89 dan 1,70 ditahun 2018, 2019 dan 2020.

4.3 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

https://jayapurakab.bps.go.id

Tabel 17. Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Jayapura, Tahun 2016—2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) *(Miliar Rp)*					
a. Rumah tangga	5.332,74	6.040,07	6.938,79	7.845,56	7.622,71
b. LNPRT	72,00	87,37	106,42	135,89	144,85
c. Pemerintah	2.315,61	2499,36	2.744,55	2.891,96	3.084,20
Jumlah	7.720,35	8.626,80	9.789,76	10.873,41	10.851,76
PDRB (ADHB) *(Miliar Rp)*	11.510,82	12.891,15	14.521,75	16.429,07	15.645,11

Proporsi *(Persen)*	67,07	66,92	67,41	66,18	69,36

*Catatan: * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara*

Hampir seluruh barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rata-rata lebih dari 66 persen). Nilai konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, Namun proporsi terhadap konsumsi total semakin menurun. Dalam hal ini, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau eskpor) memiliki peran yang lebih besar.

4.4 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

https://jayapurakab.bps.go.id

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

1. Koefisien ICOR Negatif :

   Koefisien ICOR negatif dapat terjadi jika output/NTB pada satu waktu tertentu lebih kecil daripada tahun sebelumnya. Penurunan output/NTB terjadi jika ada sebagian barang modal dijual. rusak atau tidak diaktifkan karena alasan tertentu. Walaupun mungkin ada penambahan barang modal baru, tetapi sementara itu barang modal baru tersebut belum berproduksi atau telah berproduksi namun output yang dihasilkan relatif sangat kecil dibandingkan dengan output sebelumnya. Sehingga, selisih output pada tahun ditanamkan investasi dengan tahun sebelumnya bernilai negatif. Pada gilirannya koefisien ICOR pun menjadi negatif.

   Dengan demikian penanaman barang modal baru belum menghasilkan output secara optimal, atau bisa dikatakan investasi yang ditanamkan belum/tidak efisien pada saat itu. Dipihak lain, apabila tidak ada penambahan/penggantian barang modal, maka tidak bisa dikatakan bahwa telah terjadi inefisiensi. Namun demikian secara makro keadaan yang disebutkan terakhir ini jarang terjadi.

2. Koefisen ICOR Besar

   Koefiesien ICOR yang relatif besar terjadi jika investasi yang ditanamkan pada tahun tertentu relatif besar, sedangkan output yang dihasilkan besar tetapi hampir sama dengan output pada tahun sebelumnya, atau tambahan output yang dihasilkan relatif kecil. Dengan kata lain investasi yag ditanamkan

https://jayapurakab.bps.go.id

pada tahun itu belum efektif/tidak efisien sehingga menghasilkan koefisien ICOR yang relatif besar.

Penggunaan koefisien ICOR yang besar untuk perencanaan harus hati-hati. Akan lebih baik jika ICOR yang digunakan adalah ICOR rata-rata dari beberapa tahun series data. Ini lebih mencerminkan kondisi ICOR yang sesungguhnya.

Tabel 18. Incremental Capital Output Ratio, Kabupaten Jayapura, Tahun 2016–2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	**8.081,23**	**8.647,53**	**9.312,58**	**10.028,34**	**9.517,73**
Perubahan (miliar rupiah)	**635,65**	**566,30**	**665,05**	**715,76**	**-510,61**
PMTB (ADHK 2010) (miliar Rp)	**1.765,34**	**1.938,59**	**2.092,22**	**2.279,40**	**2.353,52**
ICOR	**2,78**	**3,42**	**3,15**	**3,18**	**-4.61**

*Catatan: * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara*

https://jayapurakab.bps.go.id

Data di atas menunjukkan besaran selalu bernilai positif kecuali pada tahun 2020 karena adanya penurunan konsumsi masyarakat. Hal ini menunjukkan penanaman barang modal cukup mampu menghasilkan output optimal. Selain itu nilai ICOR selama 5 tahun nilainya tidak besar sehingga bisa dikatakan bahwa investasi yang ditanamkan di 5 tahun terkait cukup efektif atau efisien.

https://jayapurakab.bps.go.id

BAB V
PENUTUP

PENUTUP

1. PDRB menurut penggunaan tahun 2016 s.d 2020 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Jayapura pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih focus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.

2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indicator social demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.

3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2016 s.d 2020, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.

https://jayapurakab.bps.go.id

4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indicator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposibel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variable ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.

5. Sebagian data tentang interaksi dengan daerah lain secara agregat disajikan di sini, yaitu ekspor neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Jayapura terhadap ekonomi daerah lain.

https://jayapurakab.bps.go.id

LAMPIRAN

https://jayapurakab.bps.go.id

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran,Kabupaten Jayapura

(Miliar Rupiah)

	Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	**Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga**	**5.332,74**	**6.040,07**	**6.938,79**	**7.845,56**	**7.622,71**
a.	Makanan, Minuman, dan Rokok	2.540,24	2.920,47	3.460,67	4.103,07	4.198,36
b.	Pakaian dan Alas Kaki	172,99	191,86	219,13	239,49	255,57
c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	615,64	686,06	755,10	799,58	794,81
d.	Kesehatan & Pendidikan	250,71	288,28	319,43	346,86	379,39
e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	899,47	996,26	1.097,12	1.157,56	934,06
f.	Hotel & Restoran	624,37	698,37	793,10	865,49	764,50
g.	Lainnya	229,32	258,79	294,25	333,52	296,04
2.	**Pengeluaran Konsumsi LNPRT**	**71,99**	**87,37**	**106,42**	**135,89**	**144,85**
3.	**Pengeluaran Konsumsi Pemerintah**	**2.315,61**	**2499,36**	**2.744,55**	**2.891,96**	**3.084,20**
4.	**Pembentukan Modal Tetap Bruto**	**2.541,83**	**2.965,28**	**3.500,70**	**4.147,99**	**4.473,28**
a.	Bangunan	1.764,79	2.072,25	2.448,41	2.935,33	3.189,88
b.	Non-Bangunan	777,04	893,03	1.052,28	1.212,66	1.283,41
5.	**Perubahan Inventori**	**10,89**	**12,86**	**15,21**	**9,53**	**11,60**
6.	**Ekspor Neto**	**1.237,75**	**1.286,20**	**1.225,09**	**1.363,84**	**308,46**
	PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**11.510,82**	**12.891,15**	**14.531,35**	**16.394,78**	**15.645,11**

** Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*

https://jayapurakab.bps.go.id

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran,Kabupaten Jayapura

(Miliar Rupiah)

	Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	**Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga**	**3.725,54**	**4.009,90**	**4.292,07**	**4.636,07**	**4.382,76**
a.	Makanan, Minuman, dan Rokok	1.750,73	1.878,07	2.042,42	2.247,25	2.242,65
b.	Pakaian dan Alas Kaki	123,54	133,05	143,59	156,32	159,69
c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	434,36	468,08	498,28	526,98	519,99
d.	Kesehatan & Pendidikan	183,38	197,98	207,58	218,28	233,42
e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	615,40	661,50	689,06	726,57	570,13
f.	Hotel & Restoran	457,12	498,78	529,60	564,19	485,12
g.	Lainnya	161,02	172,45	181,54	196,50	171,75
2.	**Pengeluaran Konsumsi LNPRT**	**48,99**	**53,31**	**61,29**	**75,31**	**81,45**
3.	**Pengeluaran Konsumsi Pemerintah**	**1.600,41**	**1.663,88**	**1.690,00**	**1.722,44**	**1.759,64**
4.	**Pembentukan Modal Tetap Bruto**	**1.765,34**	**1.938,59**	**2.106,72**	**2.289,40**	**2.353,52**
a.	Bangunan	1.242,54	1.390,19	1.504,51	1.647,35	1.701,71
b.	Non-Bangunan	522,80	548,40	602,21	642,05	651,81
5.	**Perubahan Inventori**	**4,46**	**4,80**	**5,19**	**2,30**	**14,60**
6.	**Ekspor Neto**	**936,49**	**977,05**	**1.156,91**	**1.262,32**	**925,76**
	PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**8.081,23**	**8.647,53**	**9.312,18**	**9.987,84**	**9.517,73**

** Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*

https://jayapurakab.bps.go.id

Tabel 3. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran,Kabupaten Jayapura

(Persen)

Komponen Pengeluaran		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	**Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga**	**205,71**	**233,00**	**267,67**	**302,64**	**294,05**
a.	Makanan, Minuman, dan Rokok	213,74	245,74	291,19	345,24	353,26
b.	Pakaian dan Alas Kaki	207,91	230,59	263,37	287,85	307,16
c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	201,96	225,06	247,71	262,31	260,74
d.	Kesehatan & Pendidikan	186,16	214,05	237,18	257,54	281,70
e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	202,01	223,75	246,40	259,97	209,78
f.	Hotel & Restoran	191,85	214,58	243,69	265,93	234,90
g.	Lainnya	207,61	234,29	266,39	301,95	268,01
2.	**Pengeluaran Konsumsi LNPRT**	**226,07**	**274,34**	**334,15**	**426,71**	**454,84**
3.	**Pengeluaran Konsumsi Pemerintah**	**256,28**	**276,61**	**303,75**	**320,06**	**341,34**
4.	**Pembentukan Modal Tetap Bruto**	**212,98**	**248,46**	**293,33**	**347,56**	**374,82**
a.	Bangunan	208,90	245,30	289,82	347,46	377,59
b.	Non-Bangunan	222,87	256,13	301,81	347,81	368,10
5.	**Perubahan Inventori**	**-15,53**	**-18,34**	**-21,69**	**-13,60**	**-16,54**
6.	**Ekspor Neto**	**-638,99**	**-664,00**	**-632,76**	**-704,09**	**-159,24**
	PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	258,24	289,21	326,01	368,81	350,99

** Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*

https://jayapurakab.bps.go.id

Tabel 4. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran,Kabupaten Jayapura

(Persen)

Komponen Pengeluaran		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	**Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga**	**143,71**	**154,68**	**165,57**	**178,84**	**169,07**
a.	Makanan, Minuman, dan Rokok	147,31	158,03	171,85	189,09	188,70
b.	Pakaian dan Alas Kaki	148,48	159,91	172,58	187,88	191,94
c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	142,49	153,56	163,46	172,88	170,59
d.	Kesehatan & Pendidikan	136,16	147,00	154,13	162,07	173,31
e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	138,21	148,57	154,76	163,18	128,05
f.	Hotel & Restoran	140,46	153,26	162,73	173,35	149,06
g.	Lainnya	145,76	156,12	164,36	177,89	155,49
2.	**Pengeluaran Konsumsi LNPRT**	**153,83**	**167,41**	**192,44**	**236,47**	**255,76**
3.	**Pengeluaran Konsumsi Pemerintah**	**177,12**	**184,15**	**187,04**	**190,63**	**194,75**
4.	**Pembentukan Modal Tetap Bruto**	**147,92**	**162,44**	**176,52**	**191,83**	**197,20**
a.	Bangunan	147,08	164,56	178,09	195,00	201,44
b.	Non-Bangunan	149,94	157,29	172,72	184,15	186,95
5.	**Perubahan Inventori**	**-6,36**	**-6,83**	**-7,41**	**-3,28**	**-20,82**
6.	**Ekspor Neto**	**-483,47**	**-504,40**	**-597,26**	**-651,68**	**-477,92**
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)		**181,30**	**194,01**	**208,92**	**224,07**	**213,53**

** Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*

https://jayapurakab.bps.go.id

Tabel 5. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran,Kabupaten Jayapura

(Persen)

Komponen Pengeluaran		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	**Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga**	**46,33**	**46,85**	**47,78**	**47,85**	**48,72**
a.	Makanan, Minuman, dan Rokok	22,07	22,65	23,83	25,03	26,83
b.	Pakaian dan Alas Kaki	1,50	1,49	1,51	1,46	1,63
c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5,35	5,32	5,20	4,88	5,08
d.	Kesehatan & Pendidikan	2,18	2,24	2,20	2,12	2,42
e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	7,81	7,73	7,55	7,06	5,97
f.	Hotel & Restoran	5,42	5,42	5,46	5,28	4,89
g.	Lainnya	1,99	2,01	2,03	2,03	1,89
2.	**Pengeluaran Konsumsi LNPRT**	**0,63**	**0,68**	**0,73**	**0,83**	**0,93**
3.	**Pengeluaran Konsumsi Pemerintah**	**20,12**	**19,39**	**18,90**	**17,64**	**19,71**
4.	**Pembentukan Modal Tetap Bruto**	**22,08**	**23,00**	**24,11**	**25,30**	**28,59**
a.	Bangunan	15,33	16,08	16,86	17,90	20,39
b.	Non-Bangunan	6,75	6,93	7,25	7,40	8,20
5.	**Perubahan Inventori**	**0,09**	**0,10**	**0,10**	**0,06**	**0,07**
6.	**Ekspor Neto**	**10,75**	**9,98**	**8,43**	**8,32**	**1,97**
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

** Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*

https://jayapurakab.bps.go.id

Tabel 6. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran,Kabupaten Jayapura

(Persen)

	Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	**Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga**	**46,10**	**46,37**	**46,09**	**46,42**	**46,05**
a.	Makanan, Minuman, dan Rokok	21,66	21,72	21,93	22,50	23,56
b.	Pakaian dan Alas Kaki	1,53	1,54	1,54	1,57	1,68
c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5,37	5,41	5,35	5,28	5,46
d.	Kesehatan & Pendidikan	2,27	2,29	2,23	2,19	2,45
e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	7,62	7,65	7,40	7,27	5,99
f.	Hotel & Restoran	5,66	5,77	5,69	5,65	5,10
g.	Lainnya	1,99	1,99	1,95	1,97	1,80
2.	**Pengeluaran Konsumsi LNPRT**	**0,61**	**0,62**	**0,66**	**0,75**	**0,86**
3.	**Pengeluaran Konsumsi Pemerintah**	**19,80**	**19,24**	**18,15**	**17,25**	**18,49**
4.	**Pembentukan Modal Tetap Bruto**	**21,84**	**22,42**	**22,62**	**22,92**	**24,73**
a.	Bangunan	15,38	16,08	16,16	16,49	17,88
b.	Non-Bangunan	6,47	6,34	6,47	6,43	6,85
5.	**Perubahan Inventori**	**0,06**	**0,06**	**0,06**	**0,02**	**0,15**
6.	**Ekspor Neto**	**11,59**	**11,30**	**12,42**	**12,64**	**9,73**
	PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

** Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*

https://jayapurakab.bps.go.id

Tabel 7. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran,Kabupaten Jayapura

(Persen)

Komponen Pengeluaran		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	**Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga**	**6,88**	**7,63**	**7,04**	**8,01**	**-5,46**
a.	Makanan, Minuman, dan Rokok	7,41	7,27	8,75	10,03	-0,20
b.	Pakaian dan Alas Kaki	7,79	7,70	7,92	8,87	2,16
c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	8,02	7,76	6,45	5,76	-1,33
d.	Kesehatan & Pendidikan	5,52	7,96	4,85	5,15	6,94
e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5,12	7,49	4,17	5,44	-21,53
f.	Hotel & Restoran	6,96	9,11	6,18	6,53	-14,02
g.	Lainnya	5,55	7,10	5,27	8,24	-12,59
2.	**Pengeluaran Konsumsi LNPRT**	**7,61**	**8,83**	**14,96**	**22,88**	**8,16**
3.	**Pengeluaran Konsumsi Pemerintah**	**7,01**	**3,97**	**1,57**	**1,92**	**2,16**
4.	**Pembentukan Modal Tetap Bruto**	**6,29**	**9,81**	**8,67**	**8,67**	**2,80**
a.	Bangunan	5,72	11,88	8,22	9,49	3,30
b.	Non-Bangunan	7,64	4,90	9,81	6,62	1,52
5.	**Perubahan Inventori**	**7,48**	**7,74**	**8,15**	**-55,75**	**535,18**
6.	**Ekspor Neto**	**24,28**	**4,33**	**18,41**	**9,11**	**-26,66**
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)		**8,54**	**7,01**	**7,69**	**7,26**	**-4,71**

** Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*

https://jayapurakab.bps.go.id

Tabel 8. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran,Kabupaten Jayapura

(Persen)

Komponen Pengeluaran		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	**Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga**	**143,14**	**150,63**	**161,67**	**169,23**	**173,92**
a.	Makanan, Minuman, dan Rokok	145,10	155,50	169,44	182,58	187,20
b.	Pakaian dan Alas Kaki	140,03	144,20	152,61	153,21	160,03
c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	141,73	146,57	151,54	151,73	152,85
d.	Kesehatan & Pendidikan	136,72	145,61	153,88	158,90	162,54
e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	146,16	150,61	159,22	159,32	163,83
f.	Hotel & Restoran	136,59	140,02	149,75	153,40	157,59
g.	Lainnya	142,42	150,07	162,08	169,73	172,36
2.	**Pengeluaran Konsumsi LNPRT**	**146,97**	**163,88**	**173,64**	**180,45**	**177,83**
3.	**Pengeluaran Konsumsi Pemerintah**	**144,69**	**150,21**	**162,40**	**167,90**	**175,27**
4.	**Pembentukan Modal Tetap Bruto**	**143,99**	**152,96**	**166,17**	**181,18**	**190,07**
a.	Bangunan	142,03	149,06	162,74	178,19	187,45
b.	Non-Bangunan	148,63	162,84	174,74	188,87	196,90
5.	**Perubahan Inventori**	**244,25**	**267,75**	**292,79**	**414,81**	**79,46**
6.	**Ekspor Neto**	**132,17**	**131,64**	**105,95**	**108,04**	**33,32**
	PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**142,44**	**149,07**	**155,94**	**164,15**	**164,38**

** Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*

https://jayapurakab.bps.go.id

Tabel 9. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran,Kabupaten Jayapura

(Persen)

Komponen Pengeluaran		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	**Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga**	**5,35**	**5,23**	**7,33**	**4,68**	**2,78**
a.	Makanan, Minuman, dan Rokok	7,15	7,17	8,96	7,76	2,53
b.	Pakaian dan Alas Kaki	2,62	2,98	5,83	0,39	4,45
c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2,37	3,41	3,39	0,12	0,74
d.	Kesehatan & Pendidikan	3,53	6,50	5,68	3,26	2,28
e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5,94	3,04	5,72	0,06	2,83
f.	Hotel & Restoran	2,61	2,51	6,96	2,44	2,73
g.	Lainnya	3,50	5,37	8,01	4,72	1,55
2.	**Pengeluaran Konsumsi LNPRT**	**11,29**	**11,51**	**5,96**	**3,92**	**-1,45**
3.	**Pengeluaran Konsumsi Pemerintah**	**7,43**	**3,82**	**8,11**	**3,39**	**4,39**
4.	**Pembentukan Modal Tetap Bruto**	**9,67**	**6,23**	**8,63**	**9,04**	**4,90**
a.	Bangunan	10,43	4,93	9,17	9,49	5,20
b.	Non-Bangunan	7,90	9,56	7,30	8,09	4,25
5.	**Perubahan Inventori**	**8,96**	**9,62**	**9,35**	**41,67**	**-80,84**
6.	**Ekspor Neto**	**2,01**	**-0,40**	**-19,52**	**1,98**	**-69,16**
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)		**6,30**	**4,66**	**4,68**	**5,19**	**0,14**

** Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*

https://jayapurakab.bps.go.id

DAFTAR PUSTAKA

https://jayapurakab.bps.go.id

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri*, 1980-1990, Jakarta.
3. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Statistik Industri, berbagai seri*, Jakarta.
5. _____, *Statistik Listrik, Gas dan Air*, berbagai seri, Jakarta.
6. _____, *Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.
7. _____, *Statistik Pertambangan Non Migas*, berbagai seri, Jakarta.
8. _____, *Statistik Konstruksi*, berbagai seri, Jakarta.
9. _____*Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
10. _____, *Statistik Keuangan BUMN dan BUMD*, 1997, Jakarta 2000.
11. _____, *Profil Ekonomi Rumahtangga 1998*, Jakarta 1999.
12. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stock*s, Netherlands, 1992.
13. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts an Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
14. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.

https://jayapurakab.bps.go.id

15. United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3, New York, 1968.
16. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
17. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
18. _____, *Handbook of National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 50, New York, 1988.
19. _____, *Link between Business Accounting and National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 76, New York, 2000.
20. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
21. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.
22. World Bank, *System of National Accounts 1993*, Bahan Kursus, Washington DC, 1993

https://jayapurakab.bps.go.id